

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah salah satu kegiatan politik di negara demokrasi dengan memilih seseorang untuk mengisi suatu jabatan tertentu, jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, wakil rakyat diberbagai tingkatan, sampai kelapa desa. Diadakannya pemilu adalah satu kegiatan mewujudkan hak politik masyarakat. Sulastomo (Labobo, 2015:52) mengemukakan bahwa dengan pemilihan umum, sebuah negara diyakini dapat membangun bangsa sesuai dengan partisipasi rakyatnya secara berkelanjutan, tertib dan aman. Dengan pemilihan umum dapat tercipta suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat melindungi hak-hak setiap warna negara, sehingga mampu mendorong kreativitas setiap individu untuk ikut berperan dalam membangun bangsanya.

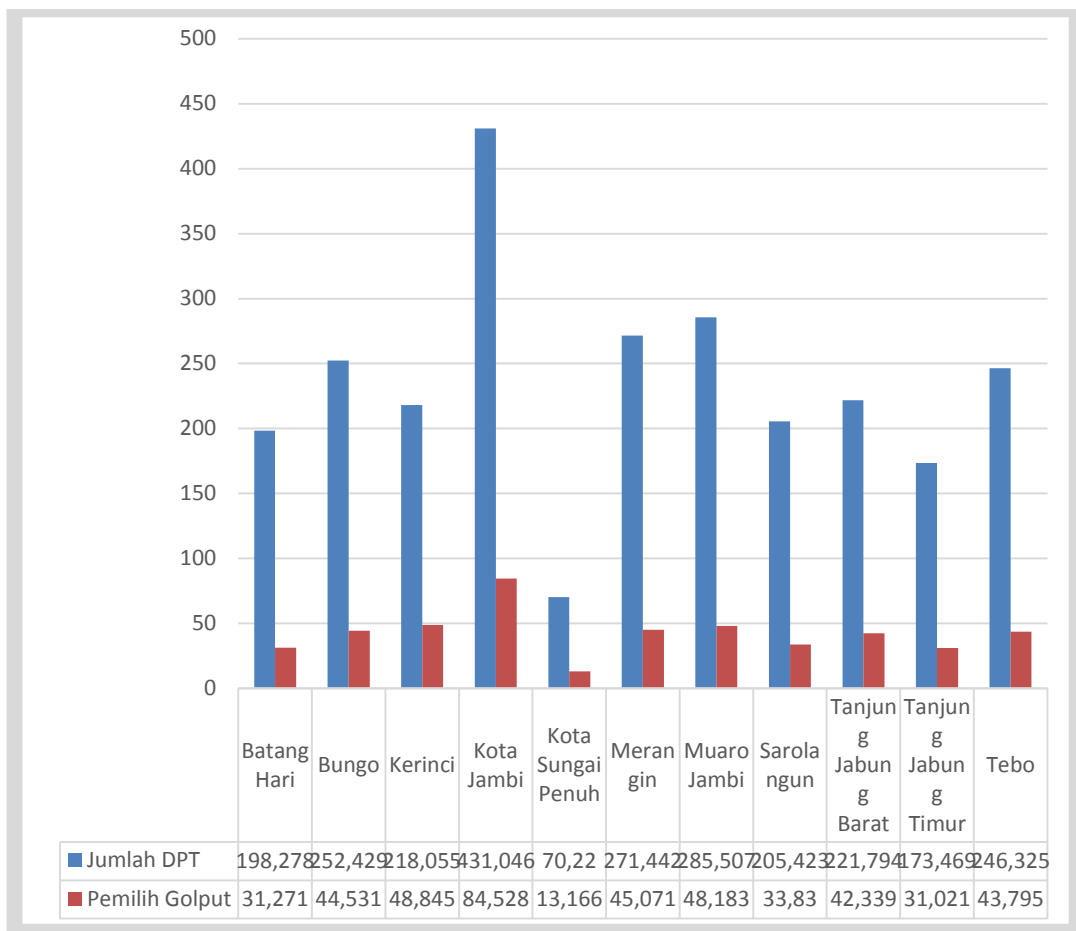
Dalam pelaksanaan pemilu tentu terdapat hak politik, dimana hak politik merupakan hak yang sangat mendasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sejalan dengan pendapat Santoso (Pasaribu, 2018:122) yang mengatakan negara memberikan jaminan perlindungan akan hak warganya yang memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih melalui aturan hukum berupa jaminan hak pilih. Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, *ICCPR (International Convenan on Civil and Political Rights)* disebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia yang bersifat absolut tidak boleh dikurangi walaupun dalam keadaan darurat. Hak bebas dari pembedaan yang bersifat surut, hak sebagai subjek hukum, kebebasan berpikir, berkeyakinan atau agama. Begitu juga hak dalam memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

yang diselenggarakan secara periodik yang bersifat universal. Hal ini mengindikasikan dimana hak politik baik memilih maupun dipilih adalah sebuah hak yang paling asasi.

Pada tanggal 17 April 2019 Indonesia melaksanakan pemilu salah satunya pemilihan presiden (Pilpres) yang diadakan serentak di seluruh Indonesia tak terkecuali di Kota Jambi. Pilpres 2019 ini merupakan Pilpres keempat yang telah diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 2004. Tujuan pemilihan presiden tidak lain adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara memilih seorang pemimpin. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mewujudkan hak politik dalam hal ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan hak pilih yang dimiliki masyarakat dalam kehidupan ketatanegaraan. Pada kenyataannya masyarakat memang sudah melaksanakan hak politiknya, namun tidak sedikit pula masyarakat yang tidak melaksanakan hak politiknya untuk memilih seorang pemimpin dengan baik terutama pada saat pemilihan presiden 2019 berlangsung di Kota Jambi.

Sukanto Reksohadiprodjo (1982:1) mengatakan kota merupakan konsentrasi kegiatan tidak saja ekonomi, melainkan politik, sosial, hukum, budaya, dan lain-lain, dalam suatu tata ruang tertentu. Kota Jambi adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Jambi tepatnya terletak di pusat Provinsi Jambi, dimana segala bentuk kegiatan terpantau langsung oleh pemerintah. Kota Jambi sendiri terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan. Dari derasnya arus informasi dan segala bentuk kegiatan politik di kota ini, mengapa Kota Jambi menjadi Kota tertinggi kedua dalam angka golput setelah Kerinci pada pemilihan presiden 2019. Hal ini sangat menarik untuk ditelusuri akar penyebabnya.

**Grafik 1.1 Presentase Hasil Hitung Suara Pilpres 2019 Wilayah Provinsi Jambi**



(Sumber: Data KPU Pusatdiolah)

Dari gambar diagram di atas menunjukkan bahwa Kota Jambi menduduki peringkat kedua dalam angka golput tertinggi setelah Kerinci pada Pemilihan Presiden 2019. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 431.000 di Kota Jambi terdapat 84.520 pemilih golput, itu artinya 19,61% dari jumlah seluruh daftar pemilih tetap (DPT) tidak melaksanakan hak pilihnya. Beda sedikit dengan Kerinci yang memiliki angka golput 22,40%. Hal ini bisa saja terjadi karena dipengaruhi oleh sikap politik dan status ekonomi masyarakat seperti yang diungkap oleh Elva R adapun sikap politik sendiri dapat menentukan hak pilih masyarakat (Hanani, Abdullahdil., dkk. 2019:206). Hal ini diperkuat dengan hasil

penelitian IB Gede Surya Pradipta & Ni Wayan Sri Suprapti yang berjudul “Pengaruh Sikap Dan Norma Subyektif terhadap Niat Calon Pemilih di Kota Denpasar untuk Memilih Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014”, hasil penelitian menunjukkan calon pemilih memiliki sikap kurang baik, norma subyektif serta niat yang rendah. Sikap dan norma subyektif berpengaruh positif signifikan terhadap niat memilih.

Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson (1990:109) juga menyebutkan bukti yang sangat melimpah dari berbagai studi menunjukkan bahwa status ekonomi tinggi berkaitan dengan perasaan mempunyai efektifitas dan kompetensi politik, dan bahwa mereka yang merasa mempunyai efektifitas jauh lebih besar kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam politik. Pelaksanaan hak politik masyarakat tinggi salah satunya apabila didukung dengan sikap politik dan status ekonomi yang tinggi pula, seperti pendapat para ahli, terdapat tiga prakondisi demokrasi yang akan mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu yaitu, modernitas dan kesejahteraan, budaya politik, dan status ekonomi masyarakat (Labobo, 2015:47-48). Kondisi status ekonomi masyarakat Kota Jambi terbilang cukup rendah, seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2 Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di Kota Jambi tahun 2019**

No	Kecamatan	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus
1	Pelayangan	-	2.379	-	1.026	-
2	Telanaipura	53	10.942	-	-	-
3	Alam Barajo	1.504	12.667	5.965	-	-
4	Jambi Selatan	91	1.952	5.024	5.986	1.074
5	Jelutung	1.324	8.418	-	-	-
6	Paal Merah	324	-	-	-	353
7	Danau Sipin	126	1.284	1.880	3.709	3.080
8	Danau Teluk	648	2.888	4.528	5.517	841
9	Kota Baru	610	6.595	5.369	3.967	-
10	Pasar Jambi	12	509	1.097	1.088	77
11	Jambi Timur	275	7.207	7.754	-	-
<b>Jumlah</b>		4.967	54.841	31.617	21.293	5.425

(Sumber: BPS Kota Jambi diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa status ekonomi masyarakat Kota Jambi sebagian besar berada di kondisi “Keluarga Sejahtera I” yang artinya kategori miskin dengan jumlah 54.841 masyarakat, sedangkan pada tingkat “Keluarga Pra

Sejahtera” atau kategori sangat miskin juga memiliki jumlah yang tidak sedikit yaitu 4.967 masyarakat. Kondisi ini bisa menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat Kota Jambi yang tidak melaksanakan hak politiknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh T. Rizky Aulia Rahmat & Dr. Firdaus, M.Hum., M.Si. (2019:7) yang mengatakan bahwa tingkat status sosial dan ekonomi, masyarakat Lambhuk berdasarkan faktor ini, cenderung memiliki peran penting, karena masih terdapat pemilih yang berpendidikan tinggi dan berpendapatan mapan kurang percaya terhadap partai politik dan pemilih yang memiliki pendidikan dan pendapatan rendah, serta pekerjaan yang kurang mapan lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terlebih dahulu daripada kehidupan politik.

Dari data di atas yang sangat mendukung, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian guna mengetahui apakah Status Ekonomi dan Sikap Politik ini memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan hak politik masyarakat pada Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jambi yang kemudian dirangkum dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Pengaruh Sikap Politik dan Status Ekonomi terhadap Pelaksanaan Hak Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jambi”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu secara teoritis bahwa:

- 1 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak politik masyarakat.
- 2 Sikap politik masyarakat Kota Jambi masih kurang baik sehingga membuat masyarakat kurang peduli untuk melaksanakan hak politiknya.
- 3 Status ekonomi masyarakat di Kota Jambi terbilang rendah sehingga membuat masyarakat enggan untuk melaksanakan hak politiknya.
- 4 Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa politik hanya untuk orang yang memiliki status ekonomi tinggi.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh sikap politik dan status ekonomi terhadap pelaksanaan hak politik masyarakat dalam pemilihan presiden 2019 di Kota Jambi ?”.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap politik dan status ekonomi terhadap pelaksanaan hak politik masyarakat dalam pemilihan presiden 2019 di Kota Jambi.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Secara Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau referensi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan

dengan pengaruh sikap politik dan status ekonomi masyarakat terhadap pelaksanaan hak politik.

## 2. Manfaat Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat penyelesaian tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

### b. Bagi Program Studi PPKn

Sebagai sumber referensi dan pengembangan terutama yang berkaitan dengan sikap politik, status ekonomi, dan hak politik yang erat kaitannya dengan mata kuliah seperti mata kuliah pendidikan politik yang ada pada kurikulum PPKn.

### c. Komisi Pemilihan Umum

Penelitian ini juga menjadi informasi bagi Komisi Pemilihan Umum beserta pelaku politik agar dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan hak politiknya dengan baik.

## 1.6. Definisi Operasional

Untuk mempermudah peneliti dalam mengukur variabel yang diteliti, maka dijelaskan definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Hak Politik

Hak politik sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali, terutama hak untuk dipilih dan memilih pada saat pemilihan umum berlangsung. Untuk mengetahui pelaksanaan hak politik masyarakat, dapat dilihat pada saat pemilihan umum berlangsung dan



bagaimana keikutsertaan mereka dalam pemilihan tersebut. Adapun indikator dari pelaksanaan hak politik itu sendiri ada dua, yaitu memilih dan tidak memilih pada saat pemilu berlangsung

## 2. Sikap Politik

Sikap politik merupakan suatu perasaan mendasar atau persepsi yang ada pada diri seseorang terhadap objek politik. Masyarakat cenderung memiliki sikap politik yang berbeda, hal ini dikarenakan sikap politik yang bersifat mendasar dan hanya diri sendiri yang dapat menentukan bagaimana sikapnya terhadap suatu objek politik tersebut. Indikator yang mampu mengukur suatu sikap politik dari seseorang ada tiga, yaitu kognisi, afeksi, dan konasi.

## 3. Status Ekonomi

Status ekonomi menggambarkan tentang kondisi seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pekerjaan dan pendapatan. Setiap individu atau masyarakat pasti menginginkan status ekonomi yang lebih baik. Namun pada kenyataannya masih banyak individu atau masyarakat yang berstatus ekonomi rendah. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur status ekonomi seseorang adalah pekerjaan dan pendapatan.